

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BABIRIK HULU KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Maulina¹, Muhammad Arsyad², Moh. Fajar Noorahman³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: Maulinanana@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi fokus analisis dalam studi ini. Berbagai faktor yang turut memengaruhinya juga diidentifikasi oleh peneliti. Pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif dipilih sebagai metode penelitian. Sebanyak 13 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling menjadi sumber data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Temuan studi mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan PKH berada pada kategori cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, kesesuaian sebagian besar penerima dengan kriteria, dan penyaluran bantuan yang berjalan sesuai jadwal. Namun, masih ditemukan kendala berupa data penerima yang belum sepenuhnya akurat, pemanfaatan bantuan yang belum sesuai dengan tujuan program, serta belum optimalnya peningkatan kondisi ekonomi keluarga dan prestasi belajar anak penerima manfaat. Meskipun demikian, bantuan PKH mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Efektivitas program didukung oleh koordinasi antara pemerintah desa dan pendamping PKH, konsistensi penyaluran bantuan, serta sosialisasi, sedangkan hambatannya meliputi pembaruan data penerima yang belum optimal dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan program.

Kata Kunci: efektivitas program, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Babirik Hulu Village, Babirik District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors affecting its implementation. A descriptive qualitative approach was employed in this study. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving 13 informants selected using purposive sampling. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Family Hope Program was moderately effective. This is reflected in the beneficiaries' understanding of the program objectives, the suitability of most beneficiaries with the established criteria, and the timely distribution of assistance. However, several challenges remain, including inaccurate beneficiary data, the improper use of assistance funds, and the limited improvement in household economic conditions and children's academic achievement. Nevertheless, the program has helped reduce household expenditures and meet basic family needs. The effectiveness of the program is supported by coordination between the village government and PKH facilitators, consistent aid distribution, and program socialization, while the main obstacles include inadequate beneficiary data updating and limited public awareness of the proper use of the assistance.

Keywords: Program Effectiveness, Family Hope Program (PKH), Social Assistance

PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga kini masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan nasional karena memberikan dampak terhadap berbagai bidang kehidupan, antara lain pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi yang terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai sehingga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan perlindungan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin agar memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana tujuan program mampu diwujudkan. Dalam konteks tersebut, efektivitas menjadi ukuran penting untuk mengetahui kemampuan suatu program dalam menghasilkan manfaat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PKH diperlukan untuk menilai keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun telah diterapkan di berbagai wilayah, implementasi PKH masih menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya ketidaksesuaian penerima manfaat dengan kriteria yang ditetapkan, penggunaan bantuan yang belum sepenuhnya mendukung tujuan program, serta dampak program yang belum memberikan perubahan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam pelaksanaan PKH di Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan serta wawancara dengan masyarakat dan keluarga penerima manfaat, ditemukan adanya keluarga yang memenuhi persyaratan namun belum memperoleh bantuan, sementara sebagian penerima dinilai sudah tidak layak menerima. Selain itu, penggunaan dana bantuan belum sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan program. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan PKH belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya peningkatan yang berarti terhadap kondisi ekonomi keluarga maupun perkembangan prestasi belajar anak penerima manfaat. Di samping itu, perbedaan penerimaan bantuan juga memunculkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Babirik Hulu dianalisis dalam studi ini dengan menyoroti faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Fokus utama yang membedakan riset ini terletak pada evaluasi keselarasan antara regulasi kebijakan dengan realitas di lapangan, bukan sekadar penilaian umum terhadap keberhasilan program. Ketepatan distribusi bantuan kepada penerima yang memenuhi syarat, alokasi dana yang dimanfaatkan, serta pengaruh program terhadap pendidikan dan kesejahteraan rumah tangga sasaran menjadi bagian dari pembahasan. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi otoritas lokal dan pemangku kepentingan agar PKH berjalan lebih akurat dalam penargetan, efisien, dan memiliki daya tahan jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2025) mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sungai Durait Hilir, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan program beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penggunaan purposive sampling pada sepuluh informan menjadi dasar pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Pelaksanaan PKH tergolong cukup efektif berdasarkan temuan penelitian. Berbagai hambatan masih teridentifikasi meliputi ketidakakuratan data penerima, bantuan yang tidak tepat sasaran, pemahaman masyarakat yang minim tentang tujuan program, serta pemanfaatan bantuan yang menyimpang dari ketentuan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi faktor pendukung

berupa kerja sama antarpihak, tingkat pemahaman masyarakat, dan kesadaran penerima manfaat, sedangkan faktor penghambat meliputi lemahnya proses validasi data serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan di Desa Babirik Hulu dengan penekanan pada analisis kesesuaian implementasi PKH terhadap ketentuan yang berlaku, meliputi ketepatan sasaran penerima, pemanfaatan bantuan, serta pengaruhnya terhadap pola belajar dan prestasi anak dalam keluarga penerima manfaat. Perbedaan fokus tersebut menjadi nilai kebaruan penelitian karena memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.

Penelitian Rahmah et al. (2024) menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Hakurung, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH secara umum telah berlangsung efektif berdasarkan indikator keberhasilan program, pencapaian tujuan, kepuasan penerima manfaat, serta dukungan input dan output program. Walaupun demikian, penelitian tersebut masih menemukan beberapa kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akibat terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Desa Babirik Hulu dengan fokus yang lebih menitikberatkan pada efektivitas implementasi PKH di tingkat masyarakat. Kajian tidak hanya mengukur keberhasilan pelaksanaan program secara umum, tetapi juga menelaah ketepatan sasaran penerima, kesesuaian pemanfaatan bantuan, serta dampaknya terhadap pola belajar dan prestasi anak penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu melalui analisis yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan PKH di lapangan.

The Liang Gie (dalam Purwanti, 2022:42) Tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan tercermin dari efektivitasnya. Apabila hasil yang dicapai selaras dengan target yang telah ditetapkan hingga tujuan yang diinginkan terwujud secara maksimal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan efektif.

Menurut James L. Gibson dkk. (dalam Pasolong, 2022:4), efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi atau kelompok dalam mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Keberhasilan tersebut tercermin dari kemampuan organisasi mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Keban yang menyatakan bahwa organisasi dapat dikatakan efektif apabila visi, tujuan, dan nilai yang telah ditetapkan mampu direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai program atau kegiatan secara optimal.

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) demi mempercepat penanggulangan kemiskinan. Konsep Conditional Cash Transfer (CCT) diadopsi dalam program yang telah berjalan sejak 2007 untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sehingga kualitas hidup penerima manfaat dapat meningkat. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya target pengentasan kemiskinan turut didukung oleh pelaksanaan PKH. (Nasution, 2025:2).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babirik Hulu, Kecamatan

Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan program berdasarkan situasi nyata di lapangan. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh berbentuk uraian deskriptif yang berasal dari pengalaman, pandangan, dan informasi yang disampaikan oleh para informan. Selama proses penelitian, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi PKH.

Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk memahami fenomena pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini menghasilkan data berupa penjelasan, pendapat, serta fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Agar data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang baik, proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara induktif sehingga penafsiran terhadap hasil penelitian lebih menekankan makna dari fenomena yang ditemukan dibandingkan penyusunan kesimpulan yang bersifat umum.

Desa Babirik Hulu yang terletak di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi lokasi pelaksanaan penelitian ini. Pemilihan desa tersebut didasarkan pada statusnya sebagai salah satu wilayah yang menjalankan Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, kawasan ini dianggap sesuai untuk menilai seberapa efektif program tersebut berjalan serta mengkaji elemen-elemen pendukung dan penghambat dalam penerapannya di tengah komunitas setempat.

Proses analisis dalam penelitian ini bertumpu pada dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Wawancara langsung dengan informan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan dalam Program Keluarga Harapan menjadi metode pengumpulan data primer, sehingga informasi tersebut berfungsi sebagai fondasi utama interpretasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari buku, artikel ilmiah, regulasi, laporan, dan dokumen relevan lainnya. Kombinasi kedua jenis data ini diterapkan untuk meningkatkan keabsahan temuan serta memastikan kelengkapan informasi yang diperlukan selama studi berlangsung.

Penentuan partisipan dalam studi ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, di mana subjek dipilih secara sengaja karena mereka memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dengan implementasi Program Keluarga Harapan. Agar data yang terkumpul relevan dengan tujuan riset serta mampu mengeksplorasi secara lebih komprehensif isu yang diteliti, metode ini diterapkan. Sebanyak tiga belas individu menjadi informan dalam penelitian ini, mencakup Kepala Desa Babirik Hulu, staf desa, fasilitator PKH, enam anggota dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan tiga warga biasa. Keragaman latar belakang informan ini diharapkan dapat menyajikan perspektif yang lebih holistik dari elemen pemerintahan desa, pengelola program, penerima bantuan, dan masyarakat sekitar.

Observasi langsung terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lokasi penelitian menjadi salah satu metode pengumpulan data, bersama dengan wawancara dan dokumentasi. Informasi mendalam dari para informan diperoleh melalui wawancara yang mencakup mekanisme program serta kendala yang muncul. Dokumentasi turut melengkapi data yang terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada kerangka Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga langkah sistematis: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sebagai pelengkap,

dokumentasi berperan sebagai data sekunder yang mencakup arsip, foto kegiatan, dokumen resmi, dan berbagai sumber tertulis relevan lainnya. Proses analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara berkesinambungan dari tahap awal hingga akhir. Kegiatan tersebut mencakup pemilihan, pengelompokan, penafsiran, dan penyusunan data untuk menghasilkan simpulan yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babirik Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penilaian terhadap keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan melalui lima tolok ukur efektivitas yang dirumuskan Sutrisno. Indikator tersebut mencakup pemahaman penerima manfaat terhadap program, akurasi penentuan sasaran, kesesuaian jadwal pelaksanaan, ketercapaian target yang ditetapkan, serta transformasi konkret yang muncul pasca-intervensi.

1. Pemahaman Program

Pemahaman program berkaitan dengan tingkat pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap tujuan, mekanisme, serta prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Tingkat pemahaman tersebut salah satunya dibangun melalui kegiatan *Family Development Session* (FDS), yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi sekaligus pembinaan kepada penerima manfaat agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Pemahaman Tujuan Program

Pemahaman terhadap tujuan program menunjukkan sejauh mana masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat, mengetahui fungsi, manfaat, dan sasaran Program Keluarga Harapan. Pengetahuan tersebut menjadi dasar agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman penerima manfaat mengenai tujuan PKH dapat dikategorikan baik. Mayoritas informan memahami bahwa program ini ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian penerima manfaat yang memandang PKH hanya sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tujuan utama program belum dimiliki secara merata oleh seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pembinaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar.

b. Kejelasan Sosialisasi

Kejelasan sosialisasi berkaitan dengan kemampuan penyelenggara program dalam menyampaikan informasi mengenai Program Keluarga Harapan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas memungkinkan penerima manfaat memahami tujuan program, hak dan kewajiban yang dimiliki, serta mekanisme pelaksanaan tanpa menimbulkan kesalahan persepsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi Program Keluarga Harapan berada pada kategori cukup efektif. Sebagian besar penerima manfaat menyatakan telah memahami materi yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya konsentrasi sebagian peserta, keterbatasan sarana pendukung, serta penyampaian materi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok penerima manfaat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar informasi yang diberikan dapat dipahami secara lebih menyeluruh oleh seluruh penerima manfaat.

2. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditentukan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Suatu program dapat dinilai tepat sasaran apabila bantuan disalurkan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Kesesuaian Penerima dengan Komponen Kriteria

Kesesuaian penerima dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat kecocokan antara kondisi Keluarga Penerima Manfaat dan komponen persyaratan yang ditetapkan dalam Program Keluarga Harapan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah penerima bantuan telah memenuhi kriteria yang menjadi dasar penetapan sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, kesesuaian penerima manfaat termasuk dalam kategori efektif. Sebagian besar KPM telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti memiliki anak yang masih menempuh pendidikan, ibu hamil atau menyusui, lanjut usia, maupun anggota keluarga penyandang disabilitas. Walaupun demikian, penelitian juga menemukan adanya masyarakat yang sebenarnya memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa penyaluran PKH telah mengacu pada kriteria yang berlaku, meskipun masih diperlukan penyempurnaan agar seluruh masyarakat yang berhak dapat memperoleh bantuan.

b. Ketepatan data penerima

Ketepatan data penerima berkaitan dengan tingkat kesesuaian data Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara adil dan tepat sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi data penerima masih belum optimal sehingga indikator ini berada pada kategori kurang efektif. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya keluarga yang kondisi ekonominya telah mengalami peningkatan tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat yang memenuhi persyaratan namun belum masuk dalam daftar penerima manfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa data penerima belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga berpengaruh terhadap ketepatan penyaluran bantuan. Oleh sebab itu, pembaruan dan verifikasi data secara berkala perlu dilakukan.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator efektivitas yang menilai apakah setiap tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana

mencerminkan pengelolaan program yang tertib serta mendukung pencapaian tujuan secara optimal.

a. Ketepatan jadwal pelaksanaan

Ketepatan jadwal pelaksanaan dalam penelitian ini berkaitan dengan kesesuaian waktu penyelenggaraan berbagai kegiatan Program Keluarga Harapan, mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga kegiatan lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kesesuaian waktu pelaksanaan diharapkan dapat meningkatkan kelancaran program sekaligus memudahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kegiatan PKH dari aspek ketepatan jadwal termasuk dalam kategori efektif. Kegiatan sosialisasi, pendampingan, maupun penyaluran bantuan umumnya dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, informasi mengenai waktu pelaksanaan juga disampaikan lebih dahulu kepada para penerima manfaat sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan. Walaupun pada kondisi tertentu terjadi penyesuaian jadwal, perubahan tersebut tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian, indikator ketepatan waktu telah terpenuhi dan mendukung efektivitas implementasi PKH.

b. Ketepatan penyaluran bantuan

Ketepatan penyaluran bantuan mengacu pada kesesuaian proses distribusi bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jadwal serta mekanisme yang ditetapkan dalam Program Keluarga Harapan. Penyaluran yang tepat waktu menjadi salah satu faktor penting agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyaluran bantuan berada pada kategori efektif. Bantuan disalurkan secara berkala mengikuti ketentuan yang berlaku dan pada umumnya diterima oleh penerima manfaat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meskipun masih dijumpai beberapa kendala teknis, seperti perubahan waktu penyaluran maupun keterbatasan fasilitas pendukung, kondisi tersebut tidak mengganggu keseluruhan proses distribusi bantuan. Oleh karena itu, mekanisme penyaluran PKH dapat dinilai telah berjalan dengan baik dan mencerminkan terpenuhinya indikator ketepatan waktu.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan melihat kesesuaian pemanfaatan dana bantuan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga. Apabila bantuan digunakan sesuai peruntukannya, maka tujuan program dapat dikatakan tercapai.

a. Kesesuaian penggunaan bantuan

Kesesuaian penggunaan bantuan menggambarkan tingkat ketepatan pemanfaatan dana PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan tujuan program. Dana bantuan diharapkan diprioritaskan untuk menunjang kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar keluarga sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kesesuaian penggunaan bantuan masih berada

pada kategori kurang efektif. Sebagian penerima manfaat telah memanfaatkan dana sesuai dengan ketentuan, terutama untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Akan tetapi, masih ditemukan penerima yang mengalokasikan bantuan untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan utama Program Keluarga Harapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran program, sehingga indikator efektivitas belum terpenuhi secara optimal.

b. Tingkat Keberhasilan Program

Tingkat keberhasilan program menunjukkan kemampuan Program Keluarga Harapan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Keberhasilan program dapat diidentifikasi dari adanya perubahan positif yang dirasakan oleh penerima manfaat setelah mengikuti program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan PKH masih termasuk dalam kategori kurang efektif. Meskipun bantuan yang diberikan mampu meringankan sebagian beban ekonomi keluarga penerima manfaat, tujuan utama program belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima, penggunaan bantuan yang belum sesuai dengan peruntukannya, serta belum adanya peningkatan yang signifikan pada aspek pendidikan maupun kesehatan penerima manfaat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa capaian Program Keluarga Harapan masih memerlukan perbaikan.

5. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata digunakan untuk menilai dampak yang muncul setelah masyarakat menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Perubahan tersebut dapat diamati melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta adanya perkembangan positif pada pola belajar maupun proses pendidikan anak sebagai salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan program.

1. Perubahan Kondisi Penerima

Dalam penelitian ini, perubahan kondisi penerima difokuskan pada aspek pendidikan. Penilaian dilakukan dengan melihat perubahan yang dialami anak dalam keluarga penerima manfaat, seperti meningkatnya kehadiran di sekolah, terbentuknya kebiasaan belajar yang lebih disiplin, serta perkembangan prestasi belajar setelah memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kondisi penerima masih berada pada kategori kurang efektif. Meskipun bantuan PKH telah membantu memenuhi sebagian kebutuhan keluarga, pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan maupun kualitas pendidikan belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi tersebut terlihat dari belum adanya peningkatan yang signifikan pada prestasi belajar anak, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan sekolah, maupun perbaikan kondisi ekonomi sebagian keluarga penerima manfaat. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum mampu memberikan perubahan yang nyata sebagaimana tujuan utama program.

2. Dampak yang dirasakan langsung

Dampak yang dirasakan secara langsung berkaitan dengan manfaat yang segera diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat setelah memperoleh bantuan PKH. Manfaat

tersebut tercermin dari berkurangnya beban pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, sekaligus adanya perubahan pada aspek pendidikan maupun kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak langsung pelaksanaan Program Keluarga Harapan berada pada kategori cukup efektif. Bantuan yang diterima mampu membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Akan tetapi, manfaat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan maupun perkembangan prestasi belajar anak secara nyata. Dengan demikian, pelaksanaan PKH lebih banyak memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat masih memerlukan upaya yang lebih optimal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babirik Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi Antar Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PKH dengan menyediakan tempat kegiatan serta membantu menyebarkan informasi kepada KPM. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa pemerintah desa turut memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan menginformasikan jadwal pelaksanaan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa dan pendamping PKH berperan sebagai faktor pendukung karena mampu memperlancar pelaksanaan kegiatan, memudahkan penyampaian informasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi program.

b. Konsistensi Penyaluran Bantuan Sesuai Jadwal

Berdasarkan hasil wawancara, penyaluran bantuan PKH umumnya berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tepat waktu. Hasil observasi turut menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan berjalan secara tertib dan diterima oleh KPM tanpa mengalami keterlambatan yang berarti. Oleh karena itu, konsistensi penyaluran bantuan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PKH.

c. Adanya Sosialisasi Program PKH

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi telah memberikan pemahaman yang cukup baik kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme Program Keluarga Harapan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang memperlihatkan bahwa pendamping PKH secara berkala memberikan arahan, penjelasan, dan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas program karena mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta tujuan pelaksanaan PKH.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya pembaruan data masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data penerima belum

berjalan secara maksimal sehingga informasi yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat terkini. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang memperlihatkan adanya perbedaan antara data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, keterlambatan dalam pembaruan data menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan PKH.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Memanfaatkan Bantuan Sesuai dengan Tujuan Program

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian Keluarga Penerima Manfaat belum sepenuhnya memahami pentingnya memanfaatkan bantuan sesuai dengan ketentuan program. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa dana PKH masih digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran penerima manfaat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan PKH karena tujuan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga belum dapat diwujudkan secara optimal.

c. Kurangnya Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih bergantung pada bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemandirian keluarga belum tercapai secara optimal.

d. Belum Optimalnya Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Pendidikan Penerima

Berdasarkan hasil wawancara, bantuan PKH memang membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, namun belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga maupun peningkatan pendidikan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum berada pada kategori cukup efektif. Efektivitas tersebut tercermin dari beberapa indikator yang telah terlaksana dengan baik, antara lain pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, kesesuaian penerima manfaat dengan kriteria yang ditetapkan, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, serta proses penyaluran bantuan yang berlangsung secara berkala. Bantuan yang diterima juga memberikan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, seperti penyampaian sosialisasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh penerima, akurasi data penerima manfaat yang masih perlu ditingkatkan, pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, keberhasilan program yang belum optimal, serta belum terlihatnya perubahan yang signifikan terhadap kondisi pendidikan dan kesejahteraan penerima manfaat.

Pelaksanaan PKH didukung oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kelancaran

implementasi program. Koordinasi yang terjalin antara pemerintah desa dan pendamping PKH mampu memperlancar pelaksanaan kegiatan melalui dukungan fasilitas dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan yang dilakukan secara rutin sesuai jadwal memberikan kepastian kepada penerima manfaat dalam memperoleh bantuan. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan PKH sehingga penerima manfaat lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

Di samping faktor pendukung tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Proses pemutakhiran data penerima yang belum optimal mengakibatkan masih adanya keluarga yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sedangkan sebagian keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik masih tercatat sebagai KPM. Selain itu, sebagian penerima manfaat belum memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan utama program karena dana masih lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada menunjang bidang pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kemandirian ekonomi penerima manfaat juga salah satunya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan upaya perbaikan, terutama pada aspek validasi data, peningkatan kualitas sosialisasi, serta penguatan pendampingan kepada penerima manfaat agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2011) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim (2018) *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. Indonesia.
- Nasution, C. (2025) *Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)*. CV Adanu Abimata.
- Pasolong, H. (2022) *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Purwanti, D. (2022) *Efektivitas Perubahan Kebijakan Penerima Peserta Didik Baru*. CV. Azka Pustaka.
- Rahmah, S., Handayani, R., & Sugianor. (2024) "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), pp. 962–972. Available at: <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/650/544>.
- Rahman, M., Setiawan, I., & Mahdalina (2025) "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(4), pp. 1755–1764. Available at: <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1532/1217>.